



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 120 TAHUN
2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SRAGEN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, maka Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun
2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Indikator
Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Sragen Tahun 2016-2021 perlu penyempurnaan dan
penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Penetapan Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen
dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SRAGEN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 120) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat(3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
 - a. IKU Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. IKU OPD.
- (2) IKU Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) IKU OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31-12-2018

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



TATAG PRABAWANTO B.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN SRAGEN DAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, PD Penanggungjawab dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.1.	Mempercepat reformasi birokrasi		
1.1.1.	Peningkatan kualitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.	1) Indeks Profesionalitas ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dengan cara meningkatkan kualifikasi, kompetensi, disiplin, serta kinerja pegawai. • Formulasi Pengukuran: $IdxPro = koef(1-gaps)+Koef(Kj)+Koef(1-\delta)$ Keterangan: Gaps : Persentase ASN yang tidak kompeten Kj : Angka SKP δSl : Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja ASN untuk jabatan yang sama (%) inDiscpl : Jumlah pelanggaran disiplin $Sl(inex))+Koef(1-inDiscpl)$ Dengan kategori tingkat profesionalitas ASN sebagai berikut: 91-100 Sangat Tinggi 81-90 Tinggi 71-80 Sedang 61-70 Rendah ≤ 60 Sangat Rendah • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

			<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data: Badan Kepegawaian Negara
1.1.2.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.	1) Tingkat akuntabilitas laporan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kondisi laporan keuangan daerah, hal ini penting dalam rangka mendorong terwujudnya tertib manajemen dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah. • Formulasi Pengukuran: Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan daerah pada tahun bersangkutan dengan peringkat sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat I opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2. Tingkat II opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 3. Tingkat III opini Tidak Wajar 4. Tingkat IV opini tidak memberikan pendapat (<i>disclaimer</i>) • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah • Sumber Data: Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Daerah
		2) Tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Sragen dalam mewujudkan <i>good governance</i> melalui pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. • Formulasi Pengukuran: Hasil evaluasi oleh Kemenpan dan RB pada tahun bersangkutan dengan peringkat sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peringkat I = AA (sangat memuaskan nilai >90-100) 2. Peringkat II A (memuaskan nilai >80-90) 3. Peringkat III BB (sangat baik nilai >70-80) 4. Peringkat IV B (baik nilai >60-70) 5. Peringkat V CC (cukup nilai >50-60) 6. Peringkat VI C (kurang nilai >30-50)

			<p>7. Peringkat VII D (sangat kurang nilai 0-30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah • Sumber Data: Laporan hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Penilai/Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
1.2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		
1.2.1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1) Nilai rata-rata IKM pada Perangkat Daerah (PD) Yang memberikan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mendapatkan <i>feedback</i> secara berkala atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya dilakukan secara berkesinambungan. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah Nilai Total IKM PD}}{\text{Jumlah PD yang dinilai IKMnya}}$ • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Bagian Organisasi Setda dan Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan publik • Sumber Data: Bagian Organisasi
		2) Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan layanan berbasis TIK	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah PD yang ada di Kabupaten Sragen yang telah menggunakan layanan berbasis TIK, mengingat TIK sangat mendukung kegiatan pelayanan cepat dan tepat yang dilakukan oleh PD. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan TIK}}{\text{Jumlah OPD di Kabupaten Sragen}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Kumulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Komunikasi dan Informatika

			<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika
1.3	Meningkatkan keamanan dan ketertiban		
1.3.1	Peningkatan keamanan, ketertiban serta penegakan peraturan	1) Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda karena merupakan salah satu langkah nyata dalam meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan Perda}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: SATPOL PP • Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja
2.1.	Meningkatkan Kualitas infrastruktur		
2.1.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	1) Persentase jembatan dalam kondisi baik	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam membangun dan meningkatkan kondisi jembatan karena pentingnya jembatan di Kabupaten Sragen sebagai penghubung antar wilayah. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah jembatan kondisi baik}}{\text{Jumlah jembatan di Kabupaten Sragen}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2) Persentase jalan dalam kondisi baik	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dibidang pembangunan dan peningkatan prasarana jalan sebagai syarat utama untuk menunjang arus transportasi dan distribusi barang dan jasa.

			<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan di Kabupaten Sragen}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		<p>3) Persentase drainase dalam kondisi baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: • Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam memelihara, membangun dan meningkatkan drainase dalam kondisi baik. Karena drainase yang baik salah satu indikator meningkatnya kualitas infrastruktur. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Drainase kondisi baik}}{\text{Drainase di Kabupaten Sragen}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		<p>4) Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam membangun, memelihara dan meningkatkan kondisi irigrasi dalam kondisi baik, karena irigasi sangat penting sebagai faktor utama peningkatan produksi pertanian mengingat sebagian besar wilayah pertanian di Kabupaten Sragen mengandalkan pengairan dari tadah hujan. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Saluran Irigrasi kondisi baik}}{\text{Saluran Irigrasi di Kabupaten}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

			<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		5) Persentase layanan akses air minum (perpipaan)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas akses air minum yang baik dan layak bagi masyarakat. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Kumulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Sumber Data: • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.2.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		
2.2.1.	Peningkatan kualitas pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	1) Persentase luas lahan kritis.	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam memantau lahan kritis yang ada di Kabupaten Sragen, guna mengendalikan luasan lahan kritis agar tidak terus bertambah. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Luas lahan kritis}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Lingkungan Hidup • Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup
2.2.2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1) Persentase tersedianya luasan Ruang Terbuka Hijau publik sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam upaya melakukan pengendalian terhadap luas RTH di wilayah Perkotaan, mengingat kondisi saat ini terjadi penurunan persentase ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan yang sebenarnya cukup penting untuk menjaga kualitas lingkungan. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah kawasan perkotaan}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

		<p>2) Persentase layanan akses sanitasi layak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan pada pemenuhan cakupan sanitasi di daerah perkotaan. Karena sanitasi layak merupakan salah satu faktor meningkatnya kualitas lingkungan • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani sanitasi}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • Sumber Data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
--	--	---	--

		3) Persentase sampah yang terolah	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pengolahan sampah dengan cara pemilahan, pendaurulangan dan pemanfaatan kembali sampah. Karena pengolahan sampah merupakan salah satu faktor meningkatnya kualitas lingkungan • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah sampah yang terolah}}{\text{Jumlah sampah yang ditangani}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Lingkungan Hidup • Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup
2.2.3.	Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman bersih dan nyaman	1) Persentase luas kawasan kumuh	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengurangi besar luas kawasan kumuh, mengingat kawasan kumuh berbanding lurus dengan tingkat kesehatan. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Luas kawasan kumuh}}{\text{Luas wilayah perkotaan}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • Sumber Data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2) Jumlah rumah tidak layak huni.	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengurangi rumah yang tidak layak huni, mengingat rumah tidak layak huni berbanding lurus dengan tingkat kesehatan. • Formulasi Pengukuran: Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun berjalan • Tipe Perhitungan: Komulatif

			<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • Sumber Data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
--	--	--	--

3.1	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah		
3.1.1	Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah	1) Pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengingat pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator yang menunjukkan peningkatan taraf hidup dan dan kesejahteraan penduduk sebagai hasil pembangunan. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{PDRB ADHP}_{(t)} - \text{PDRB ADHP}_{(t-1)}}{\text{PDRB ADHP}_{(t-1)}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Semua Perangkat Daerah • Sumber Data: Badan Pusat Statistik
		2) Persentase penduduk miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar pelaksanaan pembangunan memberikan pengaruh pada penurunan angka kemiskinan, mengingat salah satu isu strategis di Kabupaten Sragen adalah penurunan angka kemiskinan. • Formulasi Pengukuran: Head Count Index (HCI-PO) yaitu persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK) • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Semua Perangkat Daerah • Sumber Data: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS

		<p>3) Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu indikator meningkatnya pertumbuhan ekonomi. • Formulasi Pengukuran: $\text{PAD} = (\text{Pendapatan Pajak Daerah} + \text{Pendapatan Retribusi Daerah} + \text{Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}) \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah • Sumber Data: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		<p>4) Tingkat pengangguran terbuka</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penurunan pengangguran, mengingat pembangunan di Sragen prioritasnya diarahkan pada penurunan pengangguran dengan memperhatikan seberapa banyak jumlah penduduk yang memasuki usia kerja dan menjadi pencari kerja. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Tenaga Kerja • Sumber Data: Badan Pusat Statistik
		<p>5) Peningkatan PDRB perkapita (ADHB)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk Kabupaten Sragen. Karena dari pendapatan perkapita tersebut dapat diketahui kesejahteraan penduduk.

			<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Non Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan • Sumber Data: Badan Pusat Statistik
		6) Laju inflasi	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengendalikan laju inflasi. Karena laju inflasi yang tinggi berpengaruh pada penurunan kesejahteraan masyarakat. • Formulasi Pengukuran: $\text{IHK} = (\text{Pn}/\text{Po}) \times 100\%$ $\text{Laju Inflasi tahun}_n = \frac{(\text{IHK}(n) - \text{IHK}(n-1))}{\text{IHK}(n-1)} \times 100\%$ Keterangan: Pn adalah harga saat ini. Po adalah harga di tahun sebelumnya. IHK(n) adalah IHK pada tahun dasar. IHK(n-1) adalah IHK pada tahun sebelumnya. • Tipe Perhitungan: Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan • Sumber Data: BPS
		7) Produktivitas tanaman pangan utama	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator dipilih sebagai bahan evaluasi capaian peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai mengingat tanaman tersebut merupakan sumber pangan utama masyarakat sehingga produktivitasnya perlu ditingkatkan dan dijaga agar tidak terjadi kerawanan pangan. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya dalam (kw)}}{\text{Luas areal tanaman padi/bahan pangan lokal lainnya (ha)}}$ • Tipe Perhitungan: Komulatif

			<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pertanian • Sumber Data: Dinas Pertanian
		8) Produksi peternakan (daging dan telur)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator dipilih sebagai bahan evaluasi capaian peningkatan produksi peternakan (daging dan telur) mengingat hasil produksi peternakan tersebut merupakan kebutuhan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat sehingga produktivitasnya perlu dijaga dan ditingkatkan. • Formulasi Pengukuran: Jumlah produksi peternakan baik daging ayam, sapi dan telur dalam satu tahun (kg) • Tipe Perhitungan: Kumulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Peternakan dan Perikanan • Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan

		9) Skor Pola Pangan Harapan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk menyusun beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Energi masing-masing komoditas}}{\text{Angka kecukupan gizi}}$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Ketahanan Pangan • Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan
		10) Persentase Koperasi sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak koperasi sehat dibanding jumlah koperasi secara keseluruhan di Kabupaten Sragen. Sebagai bahan kebijakan pemerintah daerah guna meningkatkan daya saing koperasi. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah koperasi sehat}}{\text{Jumlah seluruh koperasi di Sragen}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah • Sumber Data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		11) Persentase meningkatnya usaha mikro dan kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak usaha mikro dan kecil secara keseluruhan di Kabupaten Sragen sebagai bahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas UKM agar dapat bersaing dengan daerah lain • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif

			<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah • Sumber Data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		12) Persentase desa inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak desa yang memiliki inovasi di Kabupaten Sragen, mengingat inovasi merupakan salah satu kunci penyelesaian masalah di desa. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah desa inovasi}}{\text{Jumlah seluruh desa di Sragen}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		13) Nilai ekspor perdagangan (US\$).	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar kenaikan nilai ekspor perdagangan di Kabupaten Sragen, mengingat nilai ekspor bersih perdagangan mempengaruhi neraca perdagangan di Kabupaten Sragen. • Formulasi Pengukuran: Jumlah Nilai ekspor perdagangan tahun berjalan • Tipe Perhitungan: Non Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		14) Persentase Kontribusi industri pengolahan dalam PDRB Atas Dasar Hak Berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk memantau seberapa banyak pertumbuhan industri pengolahan di Sragen, mengingat dalam rangka peningkatan produksi daerah industri pengolahan perlu didorong untuk terus tumbuh.

		<p>15) Persentase kenaikan kunjungan wisatawan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah kontribusi industri sektor pengolahan}}{\text{Jumlah PDRB Atas Dasar Hak Berlaku (ADHB)}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan • Sumber Data: Badan Pusat Statistik • Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengevaluasi peran serta pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dengan melihat data jumlah wisatawan yang berkunjung baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jml kunj wisatawan th n} - \text{Jml kunjungan wisatawan th n} - 1}{\text{Jumlah kunjungan wisatawan tahun n} - 1} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Kumulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata • Sumber Data: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
		<p>16) Jumlah Nilai Investasi (PMDN dan PMA).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam menarik dan mengembangkan kerjasama penanaman modal dengan investor. Mengingat pentingnya investasi sebagai salah satu faktor pendorong roda perekonomian dan pembangunan daerah. • Formulasi Pengukuran: Nilai investasi dalam tahun berjalan • Tipe Perhitungan: Kumulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

		17) Tingkat waktu penanganan korban bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa cepat kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan bencana yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Sragen, hal ini menjadi tolok ukur kesiapsiagaan pemerintah terhadap penanganan korban bencana kebakaran. • Formulasi Pengukuran: Waktu yang diperlukan dalam penanganan bencana berdasarkan pada <i>Standart Operational Procedur</i> (SOP) yang sudah berkekuatan hukum. • Tipe Perhitungan: Non Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
--	--	---	---

4.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing		
4.1.1.	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan	1) Angka Harapan Sekolah.	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar kesempatan anak usia sekolah dalam mendapatkan pelayanan pendidikan dasar di Sragen. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah anak sekolah}}{\text{Jumlah anak usia sekolah}}$ • Tipe Perhitungan: Non Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.2.	Peningkatan minat baca masyarakat.	1) Presentase Pertumbuhan pengunjung perpustakaan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk memantau perkembangan jumlah pengunjung/ pemustaka di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen dalam satu tahun, hal ini dianggap penting untuk melihat peningkatan minat baca masyarakat. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jml pengunjung perpust th n} - \text{Jml pengunjung perpust th n} - 1}{\text{Jumlah pengunjung perpustakaan tahun n} - 1} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Arsip dan Perpustakaan • Sumber Data:

			Dinas Arsip dan Perpustakaan
4.1.3.	Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.	1) Persentase Atlet Berprestasi	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan prestasi olah raga yaitu peningkatan atlet di ajang kejuaraan tingkat provinsi, nasional maupun internasional, hal ini dianggap penting untuk melihat peningkatan daya saing disemua cabang olahraga. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah Atlet yang mendapat medali}}{\text{Jumlah Atlet yang dikirim mengikuti kejuaraan}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata • Sumber Data: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
		2) Persentase organisasi pemuda yang aktif	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam memajukan organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Sragen. Karena organisasi pemuda sebagai wadah aktivitas pemuda untuk mengasah bakat, minat yang positif sehingga mampu meningkatkan daya saing pemuda di Sragen. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda di kab}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata • Sumber Data: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
4.1.4.	Pengendalian pertumbuhan penduduk.	1) Laju pertumbuhan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk memantau jumlah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sragen. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah penduduk tahun berjalan}}{\text{Jumlah penduduk tahun lalu}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Non Komulatif

			<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Sumber Data: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.1.5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1) Angka kematian ibu	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan program pelayanan kesehatan ibu yang sedang dilaksanakan, dapat memberikan pengaruh pada peningkatan status kesehatan ibu terutama ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, mengingat setiap kehamilan beresiko dan pembangunan kesehatan di Sragen prioritasnya diarahkan pada peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita. • Formulasi Pengukuran: <ul style="list-style-type: none"> $\frac{\text{Jumlah kematian ibu}}{\text{Jumlah ibu yang melahirkan}}$ • Tipe Perhitungan: Kumulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Kesehatan • Sumber Data: Dinas Kesehatan
		2) Angka kematian bayi	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini untuk mengevaluasi pelaksanaan program pelayanan kesehatan bayi yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada peningkatan kesehatan bayi yang merupakan usia rentan terhadap permasalahan kesehatan, mengingat pembangunan kesehatan di Sragen prioritasnya diarahkan pada kesehatan ibu, bayi, dan balita. • Formulasi Pengukuran: <ul style="list-style-type: none"> $\frac{\text{Jumlah kematian bayi}}{\text{Jumlah kelahiran bayi hidup dalam satu tahun}} \times 100$ • Tipe Perhitungan: Kumulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Kesehatan • Sumber Data: Dinas Kesehatan

		3) Persentase Gizi Buruk	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator prevalensi gizi buruk pada balita merupakan <i>output</i> utama dari upaya intervensi asupan gizi dan pola asuh gizi keluarga. Dalam indikator ini tercakup aspek kecukupan gizi makro (kalori dan protein) sekaligus aspek kecukupan gizi mikro (vitamin dan mineral) sebagai nutrisi pendukung pertumbuhan. Indikator ini dianggap penting untuk mengevaluasi dan mengantisipasi terjadinya kasus gizi buruk pada balita di masyarakat. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah balita penyandang gizi buruk}}{\text{Jumlah balita di kabupaten Sragen}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Kesehatan • Sumber Data: Dinas Kesehatan
4.1.6	Peningkatan kualitas penanganan PMKS dan kapasitas PSKS	1) Persentase PMKS yang ditangani	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini untuk mengetahui jumlah PMKS di Sragen yang tertangani pada tahun bersangkutan, mengingat di Sragen masih banyak PMKS yang perlu mendapatkan penanganan sosial. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah PMKS yang ditangani}}{\text{Jumlah total PMKS}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Sosial • Sumber Data: Dinas Sosial
4.1.7	Peningkatan cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan.	1) Persentase cagar budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dilestarikan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini untuk mengevaluasi peran serta upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelestarian cagar budaya, seni dan kearifan lokal. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan}}{\text{Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Non Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

			<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.1	Meningkatkan keberdayaan dan swadaya masyarakat dalam pembangunan		
5.1.1	Peningkatan kapasitas desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1) Tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini untuk mengetahui tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa karena desa merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan tingkat paling bawah. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah desa swasembada}}{\text{Jumlah desa di Sragen}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Non Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5.2	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta penanganan kekerasan		
5.2.1	Meningkatnya keadilan gender serta penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur keberdayaan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan sumbangan pendapatan, mengingat IDG Kabupaten Sragen masih perlu ditingkatkan • Formulasi Pengukuran: IDG diukur dengan cara menjumlahkan indeks keterwakilan perempuan dalam parlemen, Indeks pengambilan keputusan dan Indeks distribusi pendapatan dibagi tiga. • Tipe Perhitungan: Non Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Sumber Data: Badan Pusat Statistik

		2) Rasio KDRT	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini merupakan indikator penting guna mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah kejadian KDRT perempuan dan anak}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$ • Tipe Perhitungan: Kumulatif. • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Sumber Data: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
--	--	---------------	---

BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 70 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 120 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SRAGEN DAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016-
2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

PERANGKAT DAERAH TUGAS	: SEKRETARIAT DAERAH : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
FUNGSI	: 1) perumusan penyusunan kebijakan daerah; 2) pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan daerah; 3) penyelenggaraan kebijakan daerah; 4) pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah 5) pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah; 6) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah; 7) pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara; dan 8) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatnya tata kelola Sekretariat Daerah yang bersih dan akuntabel, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan		
1.1	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan, dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pemerintahan desa, hukum dan kesejahteraan rakyat	<p>1) Peringkat LPPD di Tingkat Provinsi Peringkat</p> <p>2) Jumlah rumusan kebijakan bidang pemerintahan desa yang tersusun</p> <p>3) Jumlah rumusan kebijakan bidang hukum yang tersusun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui kinerja Sekretariat Daerah dalam menyusun laporan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu memanfaatkan hak yang diperoleh dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. • Formulasi Pengukuran: Hasil penilaian LPPD oleh Tim dari Provinsi Jawa Tengah • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Bagian Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja Sekretariat Daerah dalam merumuskan kebijakan di bidang pemerintahan desa sebagai dasar pengambilan kebijakan Bupati di bidang tersebut. • Formulasi Pengukuran: Jumlah rumusan kebijakan tentang pemerintahan desa yang disusun dan diterapkan dalam satu tahun. • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Bagian Pemerintahan Desa <ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja Sekretariat Daerah dalam merumuskan kebijakan di bidang hukum sebagai dasar pengambilan kebijakan Bupati di bidang tersebut.

			<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran: Jumlah rumusan kebijakan tentang hukum dan perundang-undangan yang disusun dan diterapkan dalam satu tahun. • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Bagian Hukum
		4) Jumlah rumusan kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan keagamaan yang tersusun	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja Sekretariat Daerah dalam merumuskan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan keagamaan sebagai dasar pengambilan kebijakan Bupati di bidang tersebut. • Formulasi Pengukuran: Jumlah rumusan kebijakan tentang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan keagamaan yang disusun dan diterapkan dalam satu tahun. • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Bagian Kesejahteraan Rakyat
1.2	Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang dan jasa	1) Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang tersusun	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja Sekretariat Daerah dalam merumuskan kebijakan di bidang bina perekonomian, bina produksi daerah serta bina perusahaan daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan Bupati di bidang tersebut. • Formulasi Pengukuran: Jumlah rumusan kebijakan tentang bina perekonomian, bina produksi daerah serta bina perusahaan daerah yang disusun dan diterapkan dalam satu tahun. • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Bagian Perekonomian

		<p>2) Jumlah rumusan kebijakan bidang administrasi pembangunan yang tersusun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja Sekretariat Daerah dalam merumuskan kebijakan di bidang administrasi pembangunan sebagai dasar pengambilan kebijakan Bupati di bidang tersebut. • Formulasi Pengukuran: Jumlah rumusan kebijakan tentang administrasi pembangunan yang disusun dan diterapkan dalam satu tahun. • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Bagian Perekonomian
		<p>3) Jumlah standarisasi LPSE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Sekretariat Daerah dalam peningkatan layanan pengadaan secara elektronik. • Formulasi Pengukuran: Jumlah Standar LPSE yang diterima Tahun (n) + Jumlah Standar LPSE yang diterima Tahun (n-1) • Tipe Perhitungan: Kumulatif • Sumber Data: Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
<p>1.3</p>	<p>Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang organisasi, umum dan keuangan serta hubungan</p>	<p>1) Tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Sekretariat Daerah dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sragen. • Formulasi Pengukuran: Hasil evaluasi oleh Kemenpan dan RB pada tahun bersangkutan dengan peringkat sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peringkat I = AA (sangat memuaskan nilai >90-100) 2. Peringkat II A (memuaskan nilai >80-90)

	masyarakat		<p>3. Peringkat III BB (sangat baik nilai >70-80)</p> <p>4. Peringkat IV B (baik nilai >60-70)</p> <p>5. Peringkat V CC (cukup nilai >50-60)</p> <p>6. Peringkat VI C (kurang nilai >30-50)</p> <p>7. Peringkat VII D (sangat kurang nilai 0-30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Laporan hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Penilai/Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
		2) Indeks Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Sekretariat Daerah dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan percepatan reformasi birokrasi di Kabupaten Sragen. • Formulasi Pengukuran: Hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan dan RB pada tahun bersangkutan dengan peringkat sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peringkat I = AA (sangat memuaskan nilai >90-100) 2. Peringkat II A (memuaskan nilai >80-90) 3. Peringkat III BB (sangat baik nilai >70-80) 4. Peringkat IV B (baik nilai >60-70) 5. Peringkat V CC (cukup nilai >50-60) 6. Peringkat VI C (kurang nilai >30-50) 7. Peringkat VII D (sangat kurang nilai 0-30) • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Laporan hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Penilai/Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

		<p>3) Nilai Rata rata IKM pada PD yang memberikan pelayanan publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Sekretariat Daerah dalam mendapatkan <i>feedback</i> secara berkala atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya dilakukan secara berkesinambungan. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah Nilai Total IKM PD}}{\text{Jumlah PD yang dinilai IKMnya}}$ • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Bagian Organisasi
		<p>4) Nilai peringkat komposit perangkat daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mendapatkan <i>feedback</i> secara berkala atas kinerja organisasi dalam melakukan pengembangan, perbaikan, penyesuaian, maupun efisiensi kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah nilai total evaluasi kelembagaan PD}}{\text{Jumlah PD}}$ • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		<p>5) Persentase Kebijakan Pemerintah Daerah Yang Terpublikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Sekretariat Daerah sebagai ujung tombak dalam menyebarkan informasi tentang kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat.

		<p>6) Persentase Pemenuhan Kebutuhan dasar operasional Aparatur selama 12 bulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah kebijakan Pemerintah Daerah selama 12 bulan yang terpublikasi}}{\text{jumlah kebijakan Pemerintah Daerah selama 12 bulan}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Sumber Data: Bagian Hubungan Masyarakat • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Sekretariat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar operasional aparatur yang ada di Sekretariat Daerah dalam satu tahun. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah kebutuhan dasar operasional aparatur selama 12 bulan yang dipenuhi}}{\text{Jumlah kebutuhan dasar operasional aparatur selama 12 bulan}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Non Komulatif • Sumber Data: Bagian Umum dan Keuangan
		<p>7) Persentase pemeliharaan gedung milik Sekretariat Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Sekretariat Daerah dalam mengelola dan memelihara gedung yang menjadi tanggungjawabnya. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah gedung yang mendapat pemeliharaan Tahun (n)}}{\text{Jumlah total gedung milik Setda}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Kumulatif • Sumber Data: Bagian Umum dan Keuangan

- PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan pelaksanaan urusan pemerintahan di kecamatan dan desa/kelurahan.
- FUNGSI : 1) perumusan kebijakan daerah bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 2) penetapan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 3) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 4) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan;
 5) penyusunan laporan hasil pengawasan;
 6) pelaksanaan administrasi inspektorat;
 7) pemeriksaan atas laporan dan pengaduan masyarakat; dan
 8) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap manajemen pemerintahan.		
1.1.	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap manajemen pemerintahan	1) Persentase hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja inspektorat menjalankan fungsi pengawasan terhadap perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang daerah maupun pengelolaan SDM. • Formulasi Pengukuran: (Jumlah laporan hasil pemeriksaan: jumlah PKPT) X 100 %. • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Inspektorat
		2) Tingkat Maturitas SPIP	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Inspektorat dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ditingkat organisasi perangkat daerah. • Formulasi Pengukuran: Hasil Evaluasi BPKP terhadap tingkat Maturitas SPIP di Kabupaten Sragen. • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Inspektorat

		<p>3) Persentase PD yang hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) nya minimal B.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Inspektorat menjalankan fungsi pengawasan internal yaitu mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Perangkat Daerah se-Kabupaten Sragen. • Formulasi Pengukuran: (Jumlah PD yang hasil LKjIP nya minimal B: jumlah PD yang dievaluasi) X 100 % • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Inspektorat
		<p>4) Persentase Rekomendasi temuan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional internal dan eksternal yang ditindak lanjuti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja Inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan yaitu tindaklanjut PD atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal. • Formulasi Pengukuran: (Jumlah rekomendasi temuan Aparat Pengawas internal dan eksternal yang ditindak lanjuti: jumlah rekomendasi temuan aparat pengawas internal dan eksternal) X 100 %. • Tipe Perhitungan: Kumulatif • Sumber Data: Inspektorat
		<p>5) Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindak lanjuti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja Inspektorat dalam peningkatan pelayanan atas pengaduan masyarakat terhadap proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. • Formulasi Pengukuran: (Jumlah kasus yang ditindaklanjuti: jumlah kasus yang diterima Inspektorat)X 100%. • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Inspektorat
		<p>6) Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk meningkatkan kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah dalam pendidikan dan latihan pengembangan profesi. • Formulasi Pengukuran: Hasil evaluasi BPKP terhadap tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah. • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Inspektorat

- PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DEWAN
TUGAS : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan kesekretariatan DPRD meliputi administrasi umum, kehumasan dan protokol, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, persidangan dan perundang-undangan, dokumentasi dan perpustakaan serta menyediakan tenaga ahli guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- FUNGSI : 1) pelaksanaan perumusan kebijakan Sekretariat DPRD;
2) pelaksanaan perumusan program dan kegiatan teknis Sekretariat DPRD;
3) Penyusunan rencana, pengelolaan, penelaahan, pengkoordinasian, perumusan kebijakan pimpinan DPRD;
4) penyelenggaraan dan pembinaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, persidangan dan perundang-undangan serta perpustakaan;
5) pelaksanaan fasilitasi dan bantuan teknis rapat-rapat dan pertemuan oleh DPRD;
6) pelaksanaan fasilitasi dan bantuan teknis pengelolaan tata usaha dan keuangan;
7) pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerjasama antar daerah/lembaga/pihak lain serta penyediaan tenaga ahli;
8) pengintegrasian dan sinkronisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD;
10) pelaksanaan fasilitasi dan bantuan teknis penyelenggaraan rapat dan pembuatan risalah rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
11) penyelenggaraan dokumentasi hukum dan kegiatan DPRD serta kehumasan, keprotokolan, publikasi, dan informasi;
12) pelaksanaan fasilitasi dan bantuan teknis pengumpulan bahan, penelitian dan penelaahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan produk hukum daerah; dan
13) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan pelayanan untuk menunjang kinerja DPRD.		
1.1.	Meningkatnya kinerja DPRD.	1) Jumlah Raperda yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi jumlah rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. • Formulasi Pengukuran: Jumlah rancangan Peraturan daerah yang ditetapkan pada tahun berjalan. • Tipe Perhitungan: Kumulatif • Sumber Data: Sekretariat Dewan
		2) Jumlah keputusan DPRD	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi keputusan DPRD yang diputuskan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. • Formulasi Pengukuran: Jumlah keputusan DPRD pada tahun berjalan • Tipe Perhitungan: Kumulatif • Sumber Data: Sekretariat Dewan
		3) Jumlah aspirasi masyarakat yang ditampung/ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi jumlah aspirasi masyarakat yang ditampung/ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Sragen. • Formulasi Pengukuran: Jumlah aspirasi masyarakat yang ditampung/ditindaklanjuti pada tahun berjalan. • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Sekretariat Dewan
2.	Meningkatkan koordinasi antara pihak legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan kualitas dan publikasi produk hukum.		
2.1.	Meningkatnya koordinasi antara pihak legislatif dan eksekutif	1) Jumlah pengkajian terhadap produk hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi jumlah produk hukum yang dilakukan pengkajian.

	<p>untuk meningkatkan kualitas dan publikasi produk hukum.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran: Jumlah produk hukum yang dilakukan pengkajian pada tahun berjalan. • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Sekretariat Dewan
		<p>2) Jumlah publikasi produk hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi jumlah produk hukum yang dipublikasikan. • Formulasi Pengukuran: Jumlah produk hukum yang dipublikasikan pada tahun berjalan • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Sekretariat Dewan

- PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
- TUGAS : membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- FUNGSI : 1) perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 3) pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas koordinasi proses perencanaan dan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan yang lengkap dan akurat.		
1.1.	Meningkatnya kualitas koordinasi proses perencanaan dan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan yang lengkap dan akurat.	1) Tingkat kelengkapan dokumen perencanaan sektoral	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih agar dapat diukur kinerja PD perencanaan dalam penyediaan dokumen perencanaan. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah dokumen utama perencanaan yang tersedia}}{\text{jumlah dokumen utama perencanaan yang harus disediakan}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Badan Perencanan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
2.	Meningkatkan kualitas data-data pendukung perencanaan.		
2.1.	Meningkatnya kualitas data-data pendukung perencanaan.	2) Tingkat kelengkapan data-data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk menjaga ketepatan dan keakuratan data dan informasi perencanaan pembangunan.

		pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah data dan informasi pembangunan yang tersedia}}{\text{jumlah data dan informasi pembangunan yang harus disediakan}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
3.	Meningkatkan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah.		
3.1	Optimalisasi penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan inovasi daerah.	1) Presentase inovasi daerah yang difasilitasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih karena fasilitasi inovasi daerah sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan dan pengembangan daya saing daerah. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah inovasi yang difasilitasi}}{\text{Jumlah inovasi yang dihasilkan}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

- PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.
- FUNGSI : 1) perumusan kebijakan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3) pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5) pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme ASN		
1.1.	Peningkatan kualitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.	1) Indeks profesionalitas ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dengan cara meningkatkan kualifikasi, kompetensi, disiplin, serta kinerja pegawai. • Formulasi Pengukuran: $IdxPro = koef(1-gaps)+Kcoef(Kj)+Kcoef(1-\delta SI(inex))+Kcoef(1-inDiscpl)$ <p>Keterangan:</p> <p>Gaps : Persentase ASN yang tidak kompeten Kj : Angka SKP δSI : Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja ASN untuk jabatan yang sama (%) inDiscpl : Jumlah pelanggaran disiplin</p> <p>Dengan kategori tingkat profesionalitas ASN sebagai berikut: 91-100 Sangat Tinggi 81-90 Tinggi 71-80 Sedang 61-70 Rendah ≤ 60 Sangat Rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Badan Kepegawaian Negara

- UNIT ORGANISASI TUGAS : BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- TUGAS : membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- FUNGSI : 1) perumusan kebijakan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 3) pelaksanaan kebijakan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan		
1.1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan	1) Tingkat akuntabilitas laporan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kondisi laporan keuangan daerah, hal ini penting dalam rangka mendorong terwujudnya tertib manajemen dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah. • Formulasi Pengukuran: Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan daerah pada tahun bersangkutan dengan peringkat sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat I opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2. Tingkat II opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 3. Tingkat III opini Tidak Wajar 4. Tingkat IV opini tidak memberikan pendapat (<i>disclaimer</i>) • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Daerah.

			<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah benda situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah benda situs dan Kawasan cagar budaya}} \times 100\%$• Tipe Perhitungan: Non Kumulatif• Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
--	--	--	---

- PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- TUGAS : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- FUNGSI : 1) perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 3) pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan mutu dan akses pendidikan		
1.1.	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan	1) Angka Harapan Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar kesempatan anak usia sekolah dalam mendapatkan pelayanan pendidikan dasar di Sragen. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah anak sekolah}}{\text{Jumlah anak usia sekolah}} \times 100\%$ Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Meningkatkan cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan		
2.1	Meningkatkan cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan	1) Persentase cagar budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dilestariakan	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini untuk mengevaluasi peran serta upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelestarian cagar budaya, seni dan kearifan lokal.

- PERANGKAT : DINAS KESEHATAN
 DAERAH
 TUGAS : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
 FUNGSI : 1) perumusan kebijakan bidang kesehatan;
 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang kesehatan;
 3) pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Derajat kesehatan masyarakat meningkat		
1.1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1) Angka Kematian Ibu	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan program pelayanan kesehatan ibu yang sedang dilaksanakan, dapat memberikan pengaruh pada peningkatan status kesehatan ibu terutama ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, mengingat setiap kehamilan beresiko dan pembangunan kesehatan di Sragen prioritasnya diarahkan pada peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah kematian ibu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam satu tahun}} \times 100.000$ Tipe Perhitungan: Komulatif Sumber Data: Dinas Kesehatan
		2) Angka Kematian Bayi.	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini untuk mengevaluasi pelaksanaan program pelayanan kesehatan bayi yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada peningkatan kesehatan bayi yang merupakan usia rentan terhadap permasalahan kesehatan, mengingat pembangunan kesehatan di Sragen prioritasnya diarahkan pada kesehatan ibu, bayi, dan balita.

			<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah kematian bayi}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam satu tahun}} \times 100.000$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Sumber Data: Dinas Kesehatan
		3) Persentase Gizi Buruk.	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator prevalensi gizi buruk pada balita merupakan <i>output</i> utama dari upaya intervensi asupan gizi dan pola asuh gizi keluarga. Dalam indikator ini tercakup aspek kecukupan gizi makro (kalori dan protein) sekaligus aspek kecukupan gizi mikro (vitamin dan mineral) sebagai nutrisi pendukung pertumbuhan. Indikator ini dianggap penting untuk mengevaluasi dan mengantisipasi terjadinya kasus gizi buruk pada balita di masyarakat. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah penyandang gizi buruk}}{\text{Jumlah penduduk kabupaten Sragen}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Sumber Data: Dinas Kesehatan

- PERANGKAT DAERAH TUGAS : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- TUGAS : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- FUNGSI : 1) perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 3) pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas infrastruktur		
1.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	1) Persentase jembatan dalam kondisi baik.	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi jembatan dalam kondisi baik, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah jembatan kondisi baik}}{\text{Jumlah jembatan di Kabupaten Sragen}} \times 100\%$ Tipe Perhitungan: Komulatif Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

		2) Persentase jalan dalam kondisi baik	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi permukaan jalan dalam kondisi baik, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan, mengingat jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sragen masih perlu terus ditingkatkan untuk menunjang kelancaran arus transportasi dan distribusi barang. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan di Kabupaten Sragen}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Kumulatif • Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		3) % Drainase dalam kondisi baik	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi drainase dalam kondisi baik, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Drainase kondisi baik}}{\text{Drainase di Kabupaten Sragen}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Kumulatif • Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		4) Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik.	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam membangun, memelihara dan meningkatkan kondisi irigrasi dalam kondisi baik, karena irigasi sangat penting sebagai faktor utama peningkatan produksi pertanian mengingat sebagian besar wilayah pertanian di Kabupaten Sragen mengandalkan pengairan dari tadah hujan.

			<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Saluran Irigrasi kondisi baik}}{\text{Saluran Irigrasi di Kabupaten}} \times 100\%$• Tipe Perhitungan: Kumulatif• Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang• Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
--	--	--	--

- PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan daerah..
- FUNGSI : 1) perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 3) pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
			(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman		
1.1.	Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman	1) Persentase luas kawasan kumuh	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mengurangi besar luas kawasan kumuh, mengingat kawasan kumuh berbanding lurus dengan tingkat kesehatan. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Luas kawasan kumuh}}{\text{Luas wilayah perkotaan}} \times 100\%$ Tipe Perhitungan: Kumulatif Sumber Data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2) Jumlah rumah tidak layak huni	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mengurangi rumah yang tidak layak huni, mengingat rumah tidak layak huni berbanding lurus dengan tingkat kesehatan.

			<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran: Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun berjalan. • Tipe Perhitungan: Komulatif • Sumber Data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		3) Persentase layanan akses air minum (perpipaan)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas akses air minum yang baik dan layak bagi masyarakat. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Sumber Data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		4) Persentase layanan akses sanitasi layak.	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan pembangunan pada pemenuhan cakupan sanitasi di daerah perkotaan. Karena sanitasi layak merupakan salah satu faktor meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani sanitasi}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Sumber Data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

		<p>5) Persentase tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik (taman kota, makam, sarana olah raga dan jalur hijau)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam upaya melakukan pengendalian terhadap luas ruang terbuka hijau yaitu taman kota, makam, sarana olah raga dan jalur hijau di wilayah Perkotaan, mengingat kondisi saat ini terjadi penurunan persentase ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan yang sebenarnya cukup penting untuk menjaga kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Luas RTH non hutan kota}}{\text{Luas wilayah kawasan perkotaan}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Sumber Data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
--	--	--	--

- PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- TUGAS : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan daerah.
- FUNGSI : 1) perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang lingkungan hidup;
 3) pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		
1.1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1) Persentase luas lahan kritis	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam memantau lahan kritis yang ada di Kabupaten Sragen, guna mengendalikan luasan lahan kritis agar tidak terus bertambah. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Luas lahan kritis tertangani}}{\text{Luas lahan kritis}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup
		2) Persentase tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik (hutan kota)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam upaya melakukan pengendalian terhadap luas ruang terbuka hijau yaitu hutan kota di wilayah perkotaan, mengingat kondisi saat ini terjadi penurunan persentase hutan kota di wilayah perkotaan yang sebenarnya cukup penting untuk menjaga kualitas lingkungan.

			<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Luas hutan kota}}{\text{Luas wilayah kawasan perkotaan}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup
		3) Persentase sampah yang terolah	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam pengolahan sampah dengan cara pemilahan, pendaurulangan dan pemanfaatan kembali sampah. Karena pengolahan sampah merupakan salah satu faktor meningkatnya kualitas lingkungan. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah sampah yang terolah}}{\text{Jumlah timbunan sampah}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup

PERANGKAT : DINAS SOSIAL

DAERAH

TUGAS : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

FUNGSI : 1) perumusan kebijakan bidang sosial;
2) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang sosial;
3) pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		
1.1.	Peningkatan penanganan PMKS	1) Persentase PMKS yang ditangani	<ul style="list-style-type: none">• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini untuk mengetahui jumlah PMKS di Sragen yang tertangani pada tahun bersangkutan, mengingat di Sragen masih banyak PMKS yang perlu mendapatkan penanganan sosial.• Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah PMKS yang ditangani}}{\text{Jumlah total PMKS}} \times 100\%$• Tipe Perhitungan: Komulatif• Sumber Data: Dinas Sosial

- PERANGKAT DAERAH : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- TUGAS : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- FUNGSI : 1) perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3) pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Pengendalian Pertumbuhan Penduduk		
1.1.	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1) Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat Keberhasilan Pembangunan yang berwawasan Kependudukan dalam mengendalikan laju Pertumbuhan Penduduk. Formulasi Pengukuran: $\frac{(Pt - Po)}{Po} \times 100\%$ Tipe Perhitungan: Kumulatif Sumber Data: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik

2.	Meningkatkan keadilan gender serta penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak		
2.1.	Meningkatnya keadilan gender serta penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	1) Rasio KDRT	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini merupakan indikator penting guna mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah kejadian KDRT perempuan dan anak}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Sumber Data: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur keberdayaan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan sumbangan pendapatan, mengingat IDG Kabupaten Sragen masih perlu ditingkatkan. • Formulasi Pengukuran: (Indeks Keterwakilan perempuan dalam Parlemen + Indeks Pengambilan Keputusan + Indeks Distribusi Pendapatan) : 3 • Tipe Perhitungan: Komulatif • Sumber Data: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PERANGKAT : DINAS PERHUBUNGAN
 DAERAH

TUGAS POKOK : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

FUNGSI : 1) perumusan kebijakan bidang perhubungan;
 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perhubungan;
 3) pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan sarana prasarana perhubungan di Kabupaten Sragen.		
1.1.	Meningkatnya sarana prasarana perhubungan	1) Persentase pemenuhan perlengkapan jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam pemenuhan perlengkapan jalan, mengingat perlengkapan jalan adalah salah faktor yang mendukung keselamatan dalam berlalulintas. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Panjang jalan dengan perlengkapan}}{\text{Panjang jalan}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Sumber Data: Dinas Perhubungan
		2) Jumlah uji KIR angkutan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. • Formulasi Pengukuran: Jumlah kendaraan wajib uji yang melakukan uji dalam satu tahun. • Tipe Perhitungan: Komulatif • Sumber Data: Dinas Perhubungan

- PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- TUGAS POKOK : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- FUNGSI : 1) Perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan;
 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang administrasi kependudukan;
 3) Pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan;
 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administ kependudukan;
 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan tertib Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
1.1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1) Rasio penduduk ber KTP	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui dan mengevaluasi Rasio penduduk memiliki e-KTP perwajib KTP. Indikator ini dibutuhkan untuk dasar pengambilan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah penduduk} \geq 17 \text{ tahun yg ber KTP}}{\text{Jumlah penduduk wajib ber KTP}}$ Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2) Rasio bayi berakta kelahiran	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui dan mengevaluasi prosentase penduduk 0-18 Tahun memiliki Akta kelahiran. Indikator ini dibutuhkan untuk dasar pengambilan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah penduduk 0-18 th berakte kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk 0-18 th}}$

			<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3) Persentase kepemilikan akta kelahiran	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui dan mengevaluasi kepemilikan Akte kelahiran per 1000 penduduk. Indikator ini dibutuhkan untuk dasar pengambilan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk}}$ • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		4) Rasio pasangan berakta nikah	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui dan mengevaluasi rasio pasangan yang memiliki Akta Nikah. Indikator ini dibutuhkan untuk dasar pengambilan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan}}$ • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		5) Cakupan akta kematian	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui dan mengevaluasi prosentase penduduk yang memiliki Akta Kematian. Indikator ini dibutuhkan untuk dasar pengambilan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki akta kematian}}{\text{Jumlah penduduk mati}}$ • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif. • Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN
- TUGAS : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- FUNGSI : 1) perumusan kebijakan bidang pertanian;
 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pertanian;
 3) pelaksanaan kebijakan bidang pertanian;
 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian;
 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui produktivitas pertanian		
1.1.	Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah melalui produktivitas pertanian	1) Produktivitas tanaman pangan utama	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator dipilih sebagai bahan evaluasi capaian peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai mengingat tanaman tersebut merupakan sumber pangan utama masyarakat sehingga produktivitasnya perlu ditingkatkan dan dijaga agar tidak terjadi kerawanan pangan. • Formulasi Pengukuran: Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya dalam (kw) <hr/> Luas areal tanaman padi/bahan pangan lokal lainnya (ha) • Tipe Perhitungan: Komulatif • Sumber Data: Dinas Pertanian

- PERANGKAT DAERAH TUGAS : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
- TUGAS : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- FUNGSI : 1) perumusan kebijakan bidang peternakan dan perikanan;
 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang peternakan dan perikanan;
 3) pelaksanaan kebijakan bidang peternakan dan perikanan;
 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan perikanan;
 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan dan perikanan.		
1.1.	Meningkatnya produksi peternakan.	1) Produksi a. Daging b. Telur	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam upaya meningkatkan jumlah produksi daging dan telur mengingat komoditas tersebut merupakan pendukung kedaulatan pangan. • Formulasi Pengukuran: <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah produksi daging pada tahun berjalan. - Jumlah produksi telur pada tahun berjalan. • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan
		3) Populasi sapi	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam upaya meningkatkan jumlah populasi sapi mengingat komoditas tersebut merupakan pendukung kedaulatan pangan. • Formulasi Pengukuran: Jumlah populasi sapi pada tahun berjalan • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan

1.2.	Meningkatnya produksi perikanan.	1) Produksi perikanan budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam upaya meningkatkan jumlah produksi perikanan budidaya. • Formulasi Pengukuran: Jumlah produksi perikanan budidaya • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan
		2) Produksi perikanan tangkap	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam upaya meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap. • Formulasi Pengukuran: Jumlah produksi perikanan tangkap • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan

- PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN
- TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- FUNGSI : 1) perumusan kebijakan bidang ketahanan pangan;
 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang ketahanan pangan;
 3) pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan;
 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kapasitas ketahanan pangan.		
1.1.	Meningkatnya kapasitas ketahanan pangan.	1) Skor Pola Pangan Harapan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk menyusun beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Energi masing-masing komoditas}}{\text{Angka kecukupan gizi}}$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Ketahanan Pangan • Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan

- PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
- TUGAS : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemuda, olahraga dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- FUNGSI : 1) perumusan kebijakan bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
 3) pelaksanaan kebijakan bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, OPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga		
1.1.	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	1) Persentase Atlet Berprestasi	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam meningkatkan prestasi olah raga yaitu peningkatan atlit di ajang kejuaraan tingkat provinsi, nasional maupun internasional, hal ini dianggap penting untuk melihat peningkatan daya saing disemua cabang olahraga. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah Atlet yang mendapat medali}}{\text{Jumlah Atlet yang dikirim mengikut kejuaraan}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Sumber Data: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

		2) Persentase organisasi pemuda yang aktif	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam memajukan organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Sragen. Karena organisasi pemuda sebagai wadah aktivitas pemuda untuk mengasah bakat, minat yang positif sehingga mampu meningkatkan daya saing pemuda di Sragen. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda di kab}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata • Sumber Data: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
2.	Meningkatkan daya saing dan daya jual destinasi wisata		
2.1.	Meningkatnya daya saing dan daya jual destinasi wisata	1) Persentase kunjungan wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui peningkatan jumlah kunjungan wisata ke obyek wisata Kabupaten Sragen sebagai indikator meningkatnya daya saing dan daya jual wisata. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se- kabupaten}}{\text{Jumlah kunjungan wisata yang direncanakan se-kabupaten}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Sumber Data : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

- PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA
- TUGAS : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- FUNGSI : 1) perumusan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 3) pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka		
1.1.	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	1) Tingkat pengangguran terbuka	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam penurunan pengangguran, mengingat pembangunan di Sragen prioritasnya diarahkan pada penurunan pengangguran dengan memperhatikan seberapa banyak jumlah penduduk yang memasuki usia kerja dan menjadi pencari kerja. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja

- PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
- TUGAS : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- FUNGSI : 1) perumusan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan;
 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan;
 3) pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan;
 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan perdagangan;
 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui potensi perindustrian dan perdagangan		
1.1.	Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah melalui potensi perindustrian dan perdagangan	1) Nilai ekspor perdagangan (US\$).	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar kenaikan nilai ekspor perdagangan di Kabupaten Sragen, mengingat nilai ekspor bersih perdagangan mempengaruhi neraca perdagangan di Kabupaten Sragen. Formulasi Pengukuran: Jumlah Nilai ekspor perdagangan tahun berjalan Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2) Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam membina kelompok pedagang/usaha informal, mengingat pentingnya peningkatan kemandirian ekonomi daerah melalui pertumbuhan dan pengembangan kelompok pedagang/usaha informal.

- PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- FUNGSI : 1) perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 3) pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui daya tarik serta pengembangan kerjasama penanaman modal.		
1.1.	Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah melalui daya tarik serta pengembangan kerjasama penanaman modal	1) Jumlah Nilai Investasi (PMDN dan PMA)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui kinerja perangkat daerah dalam menarik dan mengembangkan kerjasama penanaman modal dengan investor. Mengingat pentingnya investasi sebagai salah satu faktor pendorong roda perekonomian dan pembangunan daerah. • Formulasi Pengukuran: Nilai investasi dalam tahun berjalan. • Tipe Perhitungan: Kumulatif • Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan		
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada penyelenggaraan perizinan dan non perizinan	1) Indeks kepuasan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan. • Formulasi Pengukuran: Survey kepuasan masyarakat • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- TUGAS : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- FUNGSI : 1) perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 3) pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan pembangunan	kapasitas desa dan partisipasi masyarakat dalam	
1.1.	Meningkatnya kapasitas desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1) Tingkat kewaspadaan masyarakat dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini untuk mengetahui tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa, karena desa merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan tingkat paling bawah. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah desa swasembada}}{\text{Jumlah desa di Sragen}} \times 100 \%$ Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.	Meningkatkan kemandirian ekonomi desa		
2.1.	Meningkatnya kemandirian ekonomi desa	1) Persentase desa inovasi	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak desa yang memiliki inovasi di Kabupaten Sragen, mengingat inovasi merupakan salah satu kunci meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah desa inovasi}}{\text{Jumlah seluruh desa di Sragen}} \times 100\%$ Tipe Perhitungan: Kumulatif Sumber Data: Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa

- PERANGKAT : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN DAERAH MASYARAKAT
- TUGAS POKOK : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- FUNGSI : 1) perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 2) pengkoordinasian penyusunan teknis bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan
 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kerjasama dengan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan.		
1.1.	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan.	1) Jumlah masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan. • Formulasi Pengukuran: jumlah peserta pembinaan tahun berjalan. • Tipe Perhitungan: Kumulatif • Sumber Data: Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.2.	Meningkatnya pendidikan politik bagi masyarakat.	1) Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/ kada	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu/Pilkada. • Formulasi Pengukuran: Jumlah pemilih dalam pemilu/kada tahun berjalan. • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

- PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- TUGAS : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, serta urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- FUNGSI : 1) perumusan kebijakan bidang penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran;
- 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran;
- 3) pelaksanaan kebijakan bidang penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran;
- 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran;
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Satpol PP; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	<i>Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat</i>		
1.1.	Meningkatnya keamanan, ketertiban serta penegakan peraturan	1) Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda)	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda karena merupakan salah satu langkah nyata dalam meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan Perda}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda}} \times 100\%$

			<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Perhitungan: Komulatif. • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Satuan Polisi Pamong Praja • Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja
1.2	Peningkatan respon time penanganan bencana	1) Tingkat waktu penanganan bencana kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa cepat kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu pelaksanaan tugas fungsi sebagai pemadam kebakaran dalam penanganan bencana kebakaran yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Sragen, hal ini menjadi tolok ukur kesiapsiagaan pemerintah terhadap penanganan korban bencana kebakaran. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah Kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}}$ • Tipe Perhitungan: Non Komulatif • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Satuan Polisi Pamong Praja • Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja

- PERANGKAT DAERAH : RSUD dr.SOERATNO
- TUGAS : memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- FUNGSI : 1) penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- 2) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- 3) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan; dan
- 4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas mutu pelayanan publik		
1.1.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	1) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja RSUD dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. • Formulasi Pengukuran: Survey kepuasan pasien • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: RSUD dr. Soeratno
2	Meningkatkan kinerja RSUD		
2.1.	Meningkatnya kinerja RSUD	1) Predikat LKjIP	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja RSUD dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

			<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran: Hasil Review LKjIP oleh Inspektorat • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: RSUD dr. Soeratno
3.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
3.1.	Menurunnya angka kematian bersih (NDR).	1) Angka kematian bersih (NDR)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi angka kematian di Rumah Sakit, sebab angka kematian di Rumah Sakit merupakan indikator agregat dari mutu pelayanan Rumah Sakit. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jml pasien mati} > 48 \text{ jam setelah dirawat}}{\text{Jml pasien keluar (hidup dan mati)}} \times 100\%$ x 1000 • Tipe Perhitungan: Kumulatif. • Sumber Data: RSUD dr. Soeratno

- PERANGKAT DAERAH : RSUD dr.SOEHADI PRIJONEGORO
- TUGAS : memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- FUNGSI : 1) penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- 2) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- 3) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan; dan
- 4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas mutu pelayanan publik		
1.1.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	1) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja RSUD dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. • Formulasi Pengukuran: Survey kepuasan pasien • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: RSUD dr. Soehadi Prijonegoro
2	Meningkatkan kinerja RSUD		
2.1.	Meningkatnya kinerja RSUD	1) Predikat LKjIP	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja RSUD dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

			<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran: Hasil Review LKjIP oleh Inspektorat • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: RSUD dr. Soehadi Prijonegoro
3.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
3.1.	Menurunnya angka kematian bersih (NDR).	1) Angka kematian bersih (NDR)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi angka kematian di Rumah Sakit, sebab angka kematian di Rumah Sakit merupakan indikator agregat dari mutu pelayanan Rumah Sakit. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jml pasien mati} > 48 \text{ jam setelah dirawat}}{\text{Jml pasien keluar (hidup dan mati)}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Kumulatif. • Sumber Data: RSUD dr. Soehadi Prijonegoro

- PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.
- TUGAS : Melaksanakan tugas dalam penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.
- FUNGSI : 1) merumuskan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
 2) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang penanggulangan bencana;
 3) pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup kabupaten;
 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;
 5) pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sragen; dan
 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kesiapsiagaan dan mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana.		
1.1.	Peningkatan respon time penanganan korban bencana	1) Tingkat waktu penanganan korban bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa cepat kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan bencana yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Sragen, hal ini menjadi tolok ukur kesiapsiagaan pemerintah terhadap penanganan korban bencana kebakaran. • Formulasi Pengukuran: Waktu yang diperlukan dalam penanganan bencana berdasarkan pada <i>Standart Operational Procedur</i> (SOP) yang sudah berkekuatan hukum. • Tipe Perhitungan: Non Komulatif • Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- FUNGSI : 1) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 2) pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3) pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 4) pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
 5) pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 7) Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 8) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 10) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 11) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan mutu pelayanan publik di kecamatan		
1.1.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di Kecamatan	1) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam memberikan pelayanan publik masyarakat di tingkat kecamatan • Formulasi Pengukuran: Survey kepuasan masyarakat • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif

			<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data: Kecamatan
2.	Meningkatkan kinerja kecamatan		
2.1.	Meningkatnya kinerja kecamatan	1) Predikat LKjIP	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. • Formulasi Pengukuran: Hasil Review LKjIP oleh Inspektorat • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif. • Sumber Data: Kecamatan

BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

			<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data: Kecamatan
2.	Meningkatkan kinerja kecamatan		
2.1.	Meningkatnya kinerja kecamatan	1) Predikat LKjIP	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. • Formulasi Pengukuran: Hasil Review LKjIP oleh Inspektorat • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif. • Sumber Data: Kecamatan

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

			<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data: Kecamatan
2.	Meningkatkan kinerja kecamatan		
2.1.	Meningkatnya kinerja kecamatan	1) Predikat LKjIP	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. • Formulasi Pengukuran: Hasil Review LKjIP oleh Inspektorat • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif. • Sumber Data: Kecamatan

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

		2) Rasio KDRT	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini merupakan indikator penting guna mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah kejadian KDRT perempuan dan anak}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$ • Tipe Perhitungan: Kumulatif. • Perangkat Daerah Penanggungjawab: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Sumber Data: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
--	--	---------------	---

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 120) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
 - a. IKU Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. IKU OPD.
- (2) IKU Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) IKU OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

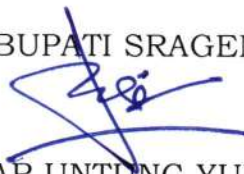
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



TATAG PRABAWANTO B.

			<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahun } n}{\text{Jumlah kelompok pedagang/usaha informal}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3) Cakupan bina kelompok pengrajin	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam membina kelompok pengrajin, mengingat pentingnya peningkatan kemandirian ekonomi daerah melalui pertumbuhan dan pengembangan kelompok pengrajin. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahun } n}{\text{Jumlah kelompok pedagang/usaha informal}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
- TUGAS : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- FUNGSI :
- 1) perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - 3) pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
 - 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
			(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas koperasi serta usaha mikro dan kecil.		
1.1.	Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas koperasi serta usaha mikro dan kecil.	1) Persentase Koperasi sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak koperasi sehat dibanding jumlah koperasi secara keseluruhan di Kabupaten Sragen. Sebagai bahan kebijakan pemerintah daerah guna meningkatkan daya saing koperasi. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah koperasi sehat}}{\text{Jumlah seluruh koperasi di Sragen}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Sumber Data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

		<p>2) Persentase meningkatnya usaha mikro dan kecil</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak usaha mikro dan kecil secara keseluruhan di Kabupaten Sragen sebagai bahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas UKM agar dapat bersaing dengan daerah lain • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Komulatif • Sumber Data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
--	--	---	--

- PERANGKAT : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- DAERAH
- TUGAS : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- FUNGSI : 1) perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika;
 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika;
 3) pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika;
 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika;
 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian		
1.1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan internal dan eksternal yang berbasis TIK dan persandian	1) Persentase PD yang menggunakan layanan berbasis TIK	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah PD di Kabupaten Sragen yang telah menggunakan layanan berbasis TIK, mengingat TIK sangat mendukung kegiatan pelayanan cepat dan tepat yang dilakukan oleh PD. Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan TIK}}{\text{Jumlah OPD di Kabupaten Sragen}} \times 100\%$ Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika
		2) Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah PD di Kabupaten Sragen yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD, mengingat persandian sangat penting dalam menjaga kerahasiaan suatu informasi.

			<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran: Jumlah PD yang menggunakan Sandi dalam komunikasi antar PD $\frac{\text{Jumlah total PD di Kabupaten Sragen}}{\text{Jumlah total PD di Kabupaten Sragen}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1) Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sragen guna mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. • Formulasi Pengukuran: Hasil Evaluasi SPBE oleh Evaluator dari Kemenpan RB yang meliputi evaluasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan. • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika
		2) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sragen guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien serta akuntabel serta masyarakat mengetahui alasan pengambilan kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. • Formulasi Pengukuran: Hasil penilaian dari Komisi Informasi Pusat dengan indikator penilaian yaitu mengumumkan dan menyediakan informasi publik, melayani dan mengelola informasi publik. • Tipe Perhitungan: Kumulatif • Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika

- PERANGKAT DAERAH : DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
- TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang arsip dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- FUNGSI : 1) perumusan kebijakan bidang arsip dan perpustakaan;
 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang arsip dan perpustakaan;
 3) pelaksanaan kebijakan bidang arsip dan perpustakaan;
 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang arsip dan perpustakaan;
 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan minat baca masyarakat		
1.1.	Meningkatnya minat baca masyarakat Kabupaten Sragen.	1) Presentase peningkatan Jumlah kunjungan perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja dinas dalam memfasilitasi dan mendorong minat baca pemustaka ke perpustakaan. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jml pengunjung th ini} - \text{Jml pengunjung th lalu}}{\text{Jml pengunjung th lalu}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Kumulatif • Sumber Data: Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.	Meningkatkan penerapan arsip baku		
2.1.	Meningkatnya penerapan arsip baku	1) Persentase Unit Kerja yang telah menerapkan arsip secara baku	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam memfasilitasi dan mendorong penerapan arsip baku di Kabupaten Sragen. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jml PD yang menerapkan arsip baku}}{\text{Jml PD secara keseluruhan}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan: Kumulatif • Sumber Data: Dinas Arsip dan Perpustakaan